

Implementasi kebijakan Autarki pendudukan Jepang dalam produksi pangan dan sandang di Pulau Jawa tahun 1944

Khanifatulhidayahti Khasanah^{1*}, Grace Tjandra Leksana²

¹Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Malang, 65145,
khanifatul.hidayhti.19073226@students.um.ac.id

²Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Malang, 65145, grace.leksana.fis@um.ac.id

***Corresponding email:** khanifatul.hidayhti.19073226@students.um.ac.id

Abstract

One of the factors that supported the success of the Asia Pacific War was the implementation of the right war strategy. The Japanese government then took political steps to implement an autarky policy to bind and control society to continue to comply with the rules and regulations implemented by the Japanese government in order to achieve victory in the war. For this reason, this research aims to explain the form of implementation of the autarky policy used by the Japanese government as a political tool to mobilize wealth and resources which are especially available on the island of Java to be directed towards supporting interests in the war. The method used is the historical method which consists of five stages, in the form of topic selection, heuristics (source collection), source criticism (verification), interpretation (source analysis) and historiography (writing). Through this research, it can be seen that the autarky policy implemented by the Japanese government was able to freely control food and clothing production to meet logistical needs during the war by using newspapers as a medium for preaching. Various forms of calls and appeals from the government are channeled through newspapers, such as calls to increase food production, land management and maximize the textile industry sector.

Keywords

Autarki Policy; Alternative Food Production; Land Management; Clothing Industry.

Abstrak

Salah satu faktor yang menunjang dalam keberhasilan Perang Asia Pasifik ialah dengan menerapkan strategi perang yang tepat. Pemerintah Jepang kemudian mengambil langkah politik untuk menerapkan kebijakan autarki guna mengikat dan mengontrol masyarakat untuk tetap tunduk pada peraturan dan ketetapan yang dijalankan oleh Pemerintah Jepang guna mencapai kemenangan dalam perang. Untuk itu dalam penelitian ini bertujuan untuk memaparkan mengenai bentuk implementasi dari penerapan kebijakan autarki yang digunakan pemerintah Jepang sebagai alat politik untuk memobilisasi kekayaan dan sumber daya yang khususnya tersedia di Pulau Jawa untuk diarahkan dalam menopang kepentingan dalam perang. Adapun metode yang digunakan ialah metode sejarah yang terdiri dari lima tahap, berupa pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (verifikasi), interpretasi (analisis sumber) dan historiografi (penulisan). Melalui penelitian tersebut dapat diketahui bahwasannya kebijakan autarki yang diterapkan oleh pemerintah Jepang dapat dengan leluasa mengontrol produksi pangan dan sandang guna mencukupi kebutuhan logistik

selama perang berlangsung dengan memanfaatkan media koran sebagai media propaganda. Berbagai bentuk seruan dan himbauan dari pemerintah disalurkan melalui media koran seperti halnya seruan untuk meningkatkan produksi pangan, pengelolaan lahan, dan memaksimalkan sektor industri tekstil.

Kata kunci

Kebijakan Autarki; Produksi Pangan Alternatif; Pengelolaan Lahan; Industri sandang.

**Received: May 31st, 2023*

**Accepted: October 30th, 2023*

**Revised: September 18th, 2023*

**Published: October 31st, 2023*

PENDAHULUAN

Keterlibatan Jepang dalam Perang Asia Pasifik melatarbelakangi penyerbuan ke wilayah Indonesia. Kebutuhan dalam perang yang besar mendorong pemerintah Jepang untuk mencari alternatif sumber daya guna menunjang kebutuhan selama perang berlangsung, sehingga berujung pada invasi ke Pulau Jawa pada tanggal 1 Maret 1942 dengan menduduki tiga wilayah di Pulau Jawa yakni di Kragan (Jawa Tengah), Eretan Wetan (Jawa Barat), dan terakhir di Teluk Banten (Fadli & Kumalasari, 2019). Pulau Jawa dianggap sebagai wilayah dengan sumber daya manusia terbesar dan secara politik dinilai lebih maju dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Indonesia (Okotorino, 2016). Selain itu, kondisi geografis Pulau Jawa dengan tanah yang subur dan pasokan air yang melimpah sangat mendukung pertumbuhan berbagai jenis keragaman hayati di Pulau ini. Singkatnya, Pulau Jawa merupakan salah satu wilayah yang cukup strategis.

Kondisi perekonomian di Indonesia yang melemah dan tidak stabil mendorong pemerintahan Jepang untuk mengambil langkah politik dan mulai memperkenalkan kebijakan-kebijakan ekonomi kepada masyarakat di Pulau Jawa. Pemerintah Jepang juga melakukan upaya kontrol secara ketat guna mencapai hasil yang maksimal (Pratama, 2018). Untuk memaksimalkan hal tersebut, pemerintah Jepang membentuk sebuah kebijakan ekonomi yang disebut sebagai kebijakan autarki. Kebijakan ini mulai dijalankan oleh pemerintah Jepang pada tahun 1942. Kebijakan autarki merupakan sebuah konsep kebijakan yang mengharuskan sebuah daerah atau wilayah untuk mampu mencukupi dan memenuhi kebutuhannya sendiri, baik dalam bentuk barang maupun jasa (Putri, 2014). Sehingga implementasi yang akan dicapai dari kebijakan ini nantinya akan menghasilkan sebuah daerah atau wilayah yang mandiri terutama dari segi pemenuhan perekonomian.

Secara intensif pemerintah Jepang menerapkan beberapa skema ekonomi seperti melakukan kontrol pada produksi hasil bumi, menetapkan jenis tanaman yang harus ditanam, dan memobilisasi tenaga kerja (Kurasawa, 2015). Upaya ini dilakukan agar semua potensi di Pulau Jawa dapat dioptimalkan semaksimal mungkin. Utamanya terkait dengan bahan pangan dan sandang yang diprioritaskan untuk memasok kebutuhan pasukan militer. Untuk itu, pemerintah berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin bahan pangan baik dari sektor pertanian maupun hasil bumi yang kemudian akan membatasi seluruh peredaran dan distribusi atas barang-barang tersebut.

Diterapkannya kebijakan autarki juga berpengaruh terhadap kecepatan arus informasi. Penyampaian informasi yang cepat dan tepat menjadi indikasi penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan maupun propaganda yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Oleh sebab itu, pemerintah Jepang memanfaatkan media surat kabar koran sebagai sarana komunikasi dan menyebarkan semua poin-poin kebijakan yang telah ditetapkan. Melalui media ini pemerintah dapat melakukan himbauan dan memegang kendali serta kontrol terhadap semua bentuk kegiatan masyarakat maupun pemerintahan baik dibidang politik, sosial maupun ekonomi yang khususnya menunjang kebutuhan perang. Dengan demikian, semua kebutuhan logistik selama perang dapat segera terpenuhi.

Untuk itu, pemerintah Jepang segera menerapkan sistem penyerahan wajib padi dibawah komando langsung setiap *shū cho* (kepala karesidenan). Sistem ini menetapkan kuota tertentu yang harus dipenuhi masyarakat, khususnya para petani atas hasil panen yang mereka peroleh (Kurasawa, 2015). Dalam hal ini, *Shū chobebas* menetapkan dekrit ataupun maklumat sesuai dengan kebutuhan setiap karesidenan yang kemudian disebarluaskan melalui media surat kabar. Sistem ini mulai dijalankan oleh pemerintah Jepang pada bulan Agustus tahun 1942 melalui putusan *gunseikanbu* (Julianto, 2004). *Gunseikanbu* merupakan staf pemerintah pusat militer Jepang yang terdiri dari lima macam *bu* (departemen) (Fadli & Kumalasari, 2019).

Melalui sistem wajib serah padi, pemerintah memegang kendali penuh atas peredaran bahan pangan. Gudang-gudang dipenuhi dengan pasokan beras, akan tetapi hal ini tidak berpengaruh pada kesejahteraan dan ketahanan pangan masyarakat pribumi. Akibatnya, terjadi perubahan secara radikal dalam sistem tata kehidupan masyarakat dan turut berdampak pada laju keseimbangan pasokan dan permintaan (*supply and demand*) terhadap persediaan barang dan komoditas (van der Eng, 2008). Dampaknya beberapa ketersediaan barang, terutama kebutuhan pokok mengalami kekurangan.

Kondisi ini juga diperburuk dengan terhentinya perdagangan luar negeri. Pada tahun 1944, pihak sekutu telah melakukan blokade ekonomi secara total atas semua kepentingan dan kebutuhan Jepang (Oktorino, 2016). Hal ini berdampak besar pada komoditas-komoditas yang dibutuhkan masyarakat, misalnya kebutuhan tekstil yang masih bergantung pada suplai impor dari negara-negara Eropa (*Djoroewarta S.S.A*, 2 September 1944). Terhentinya impor tekstil tersebut semakin memperburuk kondisi pada masa itu. Ketidaktersediaan bahan mentah berupa benang ataupun kain berdampak pada ketersediaan pakaian. Akibatnya produksi bahan pakaian tidak bisa berjalan seperti sebelumnya. Kelangkaan pakaian di pasaran menyebabkan harga jualnya semakin tinggi. Tentunya hal ini menimbulkan problematika baru di masyarakat.

Pada masa ini sektor ekonomi masyarakat semakin melemah dan kesulitan untuk mencukupi segala kebutuhan dan keperluan pokok sehari-harinya. Kondisi yang tidak stabil ini dapat berpengaruh dan menghambat kinerja masyarakat dalam mengumpulkan kebutuhan logistik untuk perang. Dengan demikian, munculnya

berbagai persoalan yang ada, menarik perhatian penulis untuk berusaha menganalisa sejauh mana implementasi dari kebijakan autarki dapat mengurai berbagai bentuk problematika yang muncul terkait dengan penunjang kebutuhan logistik perang disamping terjadinya krisis kebutuhan pokok sehari-hari yang dialami oleh masyarakat di Pulau Jawa.

Dalam kajian ini juga menganalisa langkah-langkah apa saja yang akan diterapkan oleh pemerintah militer Jepang khususnya dalam bidang pangan dan sandang. Adapun kajian yang terkait dengan strategi dan kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah Jepang salah satunya ialah karya tulis dari Denik Kharisma Sari (2012) yang menjelaskan mengenai jalannya kebijakan pertanian dan perkebunan yang diterapkan pemerintah Jepang di Blitar. Pada tulisan ini juga dijabarkan mengenai pemberontakan oleh tentara PETA yang disebabkan karena faktor ketidakadilan, penindasan dan perampasan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang terhadap penduduk di Blitar.

Selain kajian di atas juga terdapat analisis dari Pierre Van Der Eng (2008) yang menjelaskan mengenai laporan data produksi makanan dan peraturan pasar beras di Pulau Jawa. Di sini dijelaskan mengenai peredaran dan pemerataan beras ke beberapa wilayah di Pulau Jawa, serta penurunan produksi pangan dimana mulai terjadi ketidakseimbangan dalam produksi beras. Selain kajian tersebut, terdapat kajian yang menyinggung mengenai kelangkaan bahan pakaian yang termuat dalam penelitian Kunto Sofianto(2014). Pada kajian ini dijelaskan mengenai kesulitan masyarakat di Garut untuk memperoleh bahan sandang yang telah menghilang di pasaran sejak tahun 1943. Terdapat pula kajian dari Reyna Aisyah (2016) yang membahas mengenai kondisi industri tekstil dan perekonomian masyarakat Surabaya pada masa pemerintahan Jepang. Kajian ini memaparkan bagaimana usaha pemerintah dalam mengembangkan industri tekstil lokal dan berupaya mencapai swasembada sandang.

Beberapa kajian yang ada sebatas memaparkan secara umum mengenai implementasi dan dampak kebijakan yang khususnya dirasakan oleh penduduk pribumi selama Jepang berkuasa di Pulau Jawa. Selain itu, masih minimnya literatur yang menyoroti mengenai bentuk propaganda Pemerintah Jepang melalui media surat kabar dan banyaknya tulisan yang mengambil sudut pandang Indonesia sentris menarik perhatian penulis untuk mencoba melakukan kajian dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini akan berusaha menggambarkan mengenai apa saja bentuk upaya dan strategi yang dijalankan pemerintah Jepang dalam memobilisasi semua bentuk kekayaan di Pulau Jawa terutama mengenai hasil bumi dengan memaksimalkan koran sebagai media propaganda. Penulis berusaha melakukan kajian sejarah dengan mencoba mengumpulkan dan menganalisa berbagai bentuk mekanisme dan strategi propaganda yang ditetapkan pemerintah Jepang sebagai bentuk dukungan dalam perang Asia Pasifik. Sehingga diharapkan hasil dari historiografi ini dapat memberikan kontribusi dalam lingkup sejarah politik yang didasarkan pada data dan fakta pada masa lampau.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan ini berupa metode sejarah yang terdiri dari lima tahap yakni pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (verifikasi), interpretasi (analisis sumber) dan historiografi (penulisan) (Kuntowijoyo, 2003). Pada tahap pemilihan topik, penulis menentukan tema kajian yang akan dibahas dan memberikan batasan pada topik yang akan dikaji agar lebih mendalam dan kompatibel. Tahap selanjutnya penulis berusaha mengumpulkan berbagai sumber yang sekiranya relevan dan mendukung dalam topik kajian. Adapun klasifikasi sumber yang mendukung dalam tulisan ini terbagi atas sumber primer dan sekunder. Pada tulisan ini menggunakan beberapa sumber primer yakni berupa arsip koran Sinar Baroedan Asia Raya dengan edisi tahun terbit 1944. Semua bentuk arsip surat kabar tersebut diakses secara online melalui web resmi Perpustakaan Nasional. Namun, dari beberapa sumber arsip yang telah diperoleh belum mengarah pada salah satu wilayah maupun daerah tertentu. Sehingga penulis mengambil cakupan wilayah secara umum di wilayah Pulau Jawa dengan memfokuskan kajian pada tahun 1944. Pemilihan temporal ini didasarkan pada kondisi kritis pemerintah Jepang dalam perang Asia Pasifik yang kemudian berpengaruh terhadap implementasi dari kebijakan autarki yang semakin digencarkan.

Selain itu, dalam penulisan ini juga didukung dengan sumber sekunder yang berupa buku, jurnal, maupun artikel yang sesuai dengan topik kajian. Dalam mengakses sumber sekunder yang berupa buku, penulis memanfaatkan perpustakaan daerah di Kabupaten Blitar dan juga Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Malang serta beberapa media artikel maupun jurnal yang dapat diakses secara online. Pada tahap selanjutnya, penulis akan melakukan kritik sumber baik secara eksternal maupun internal yang mencakup mengenai keautentikan sumber dan memvalidasi terkait dengan isi sumber yang digunakan. Selanjutnya, penulis menganalisis semua bentuk sumber yang digunakan dan merangkai semua data maupun fakta yang telah ditemukan menjadi sebuah historiografi (penulisan) sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai daerah penopang kebutuhan dalam perang, wilayah Pulau Jawa menjadi basis pusat perekonomian pada masa pendudukan Jepang. Hal ini didukung dengan diterapkannya kebijakan autarki yang menjadi dasar laju perekonomian kala itu. Untuk mengoptimalkan kebijakan tersebut, pemerintah Jepang menerapkan tiga bentuk implementasi utama yakni yang pertama dengan meningkatkan hasil produksi pangan meliputi olahan sumber pangan alternatif pengganti nasi seperti olahan dari ketela manis, soba, tjantel, dan olahan lainnya. Kedua, mengoptimalkan pengelolaan lahan dengan cara memperluas area tanam dan penggunaan pupuk organik. Untuk yang terakhir pemerintah Jepang memfokuskan pada swasembada sandang masyarakat melalui industrialisasi sandang secara lokal.

Peningkatan Produksi Pangan dan Intensifikasi Pangan Alternatif

Begitu mendesaknya kebutuhan pangan mengharuskan pemerintah Jepang untuk lebih mempertimbangkan penggunaan bahan baku yang tersedia di alam dan memanfaatkannya semaksimal mungkin. Adanya bahan baku alternatif ini diharapkan nantinya dapat diakses dan diolah dengan mudah oleh masyarakat secara luas. Meski nantinya kualitas dan kuantitas yang dihasilkan sedikit lebih rendah, namun setidaknya mampu mengatasi persoalan pangan yang muncul pada waktu itu. Untuk itu, dalam bidang pangan pemerintah Jepang menekankan pada penggunaan bahan baku yang tidak hanya sekedar enak untuk dikonsumsi, akan tetapi lebih menekankan pada banyaknya hasil yang diperoleh.

Oleh sebab itu, pemerintah menganjurkan untuk menanam ketela manis. Diperkirakan dalam satu hektar lahan dapat menghasilkan sedikitnya 100 hingga 350 kuintal dalam rentang waktu empat bulan. Hasil ini jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan padi yang hanya mampu menghasilkan paling banyak sekitar 15 kuintal saja dalam setiap kali panen (Djoroewarta Dst, 14 Juni 1944). Untuk itu, melalui koran Asia Raya pemerintah mulai menyebarluaskan mengenai tata cara dalam menanam ketela manis. Adapun tata cara dalam menanam ubi manis ialah dengan menggali lubang dengan menyiapkan lahan yang sudah dibuat bedengan/larikan dengan jaraknya 1 m dengan tinggi gundukan tanah sekitar 30-40 cm. Selanjutnya membuat lubang dengan kedalaman 15 cm dan diberi pupuk ataupun kompos. Untuk benihnya pilih bagian batang tumbuhan ketela dengan panjang sekitar 30 cm dan berikan jarak antara benih satu dengan lainnya sekitar 40cm. Adapun untuk perawatannya terbilang cukup mudah hanya perlu dibersihkan dari rumput-rumput liar dan dijaga dari hama ulat yang dapat menyerang daun (Djoroewarta Dst, 14 Juni 1944).

Keseriusan Pemerintah Jepang dalam menanggapi persoalan pangan ialah dengan mendatangkan sebanyak 4 liter benih soba (buckwheat) langsung dari Jepang ke Pulau Jawa. Berdasarkan koran Asia Raya yang terbit pada tanggal 23 Februari tahun 1944, rencana penanaman soba akan dilakukan secara besar-besaran dan diperluas hingga 300 hektar untuk daerah Garut dan sekitarnya. Keunggulan dari tanaman ini ialah dapat tumbuh di daerah-daerah dingin dan dapat ditanam sepanjang tahun dengan masa panen hanya dalam 70 hari. Pada biji soba juga mengandung gizi dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti vitamin B dan C (Djoroewarta S.S.A., 23 Februari 1944). Soba dapat diolah menjadi tepung dan dapat dibuat hidangan mie yang tak kalah enak dengan mie yang sebelumnya masyarakat konsumsi.

Demikian karena sulitnya untuk memperoleh nasi, maka pemerintah Jepang menyebarkan alternatif olahan pangan berbahan dasar tjantel. Melalui koran Sinar Baroeolahan tjanteldiperkenalkan kepada masyarakat secara luas. Tjantel umumnya hidup didaerah yang kering dan panas. Tanaman ini dapat tumbuh pada daerah dengan ketinggian mencapai 1.500 M diatas permukaan laut seperti di daerah Wonogiri dan Gunungkidul. Selain karena faktor tanahnya yang kering tumbuhan ini dapat beradaptasi dengan kondisi tanah yang kurang subur dan banyak mengandung zat kapur. Karena ketahanannya tersebut, penanaman tjanteldianggap sebagai salah

satu strategi yang sesuai untuk mengatasi kondisi kekeringan pada masa ini. Bahkan, di daerah Solo sudah ditetapkan mengenai penanaman tjantel sebagai pengganti padi. Solo Ko Kooti (raja kerajaan solo) telah menetapkan seluas 6.000 hektar tanah untuk ditanami tjantel dan ditaksirkan dapat menghasilkan panen sejumlah 40.000 kwintal (Sinar Baroe, 9 Mei 1944).

Tidak hanya sekedar mengenalkan pada alternatif olahan tjantel, pemerintah juga menginformasikan mengenai tatacara penyimpanan dan pengolahan tjantel dengan memanfaatkan media koran Asia Raya. Dijelaskan bahwasannya pada usia tiga setengah bulan tjantel sudah bisa dipanen. Setelah itu tjantel dijemur hingga kering. Setelah kering tjantel ditumbuk agar terpisah dari bijinya, cara ini tidak jauh berbeda dengan cara menumbuk padi. Ada berbagai cara dalam menyimpantjantel yakni dengan langsung disimpan dan diikat bersama batangnya ataupun dapat disimpan seperti menyimpan padi (Asia Raya, 29 April 1944). Namun, pada daerah sekitar Madiun dan Jogjakarta hasil panen tjantel direbus terlebih dahulu baru kemudian dijemur hingga kering baru bisa disimpan. Cara ini dilakukan agar tjantel tidak mudah dirusak oleh binatang-binatang kecil.

Pengolahan tjanteldapat dilakukan setelah dipastikan dalam kondisi yang benar-benar kering. Setelah kering, tjantel dapat ditumbuk maupun digiling. Proses selanjutnya ditapeni (proses pemisahan selaput kulit tipis dari biji tjantel) dan setelah bersih, tjantel dipoesosi (dicuci). Sekiranya sudah bersih tjantelbisa langsung didang (ditanak) seperti memasak nasi. Proses memasak kira-kira selama 30 menit. Setelah setengah matang tjantel diangkat dan dapat diletakkan dalam kuali dan disedu dengan air hangat. Selanjutnya didang (ditanak) lagi sampai matang kurang lebih selama 30 menit (Asia Raya, 29 April 1944). Tjantel yang matang sudah bisa langsung dikonsumsi atau bisa menambahkan sedikit garam dan kelapa sama seperti dalam mengonsumsi ketan.

Selain olahan tjantelmasyarakat juga dapat mengonsumsi gaplek sebagai alternatif pengganti nasi. Berdasarkan nasihat dari Dokter Liem Tjay Tie dari DjawatanKesehatan Semarang Si dalam koran Sinar Baroe, beliau memberikan keterangan kepada para penduduk tentang cara-cara memasak gaplek, dalam mengolah gaplek sebelum dimasak hendaknya dicuci bersih terlebih dahulu kemudian direndam dalam air semalaman kemudian dicuci sekali lagi baru dapat dimasak dan diolah. Jika akan dijadikan tepung, maka gaplek harus dijemur hingga kering baru kemudian ditumbuk halus hingga menjadi tepung (Sinar Baroe, 5 Februari 1944).

Selain beberapa anjuran untuk melipatgandakan hasil bumi, pemerintah Jepang juga menyemarakkan propaganda mengenai "Makanan Rakyat Yang Murah Tetapi Bermanfaat" yang dimuat dalam berita harian Asia Raya yang terbit pada tanggal 26 Februari tahun 1944. Intinya propaganda tersebut menyeru kepada masyarakat untuk mengonsumsiolahan alternatif yang lebih terjangkau oleh masyarakat seperti olahan katoel yang dapat dijadikan tempe. Katoel dapat dijadikan sebagai tempe karena terdapat zat putih telur dan vitamin yang terkandung didalamnya. Adapun cara pengolahannya ialah dengan membersihkan terlebih dahulu katoel, setelah bersih

katoel dikukus dan dijemur hingga kering. Setelah kering katoel dapat langsung digoreng dan dijadikan lauk (Domei, 26 Februari 1944).

Pemerintah Jepang juga menganjurkan untuk memakan daging binatang lain untuk menambah protein dan kesehatan rakyat. Namun, di lainsisi masyarakat kesulitan untuk memperoleh daging ternak untuk dikonsumsi, sehingga muncullah alternatif olahan pangan berbahan dasar bekicot. Pemerintah kemudian melakukan penelitian dan uji coba yang hasilnya menyatakan bahwa bekicot sama sekali tidak mengandung racun bagi manusia dan tidak akan menimbulkan gangguan apapun pada kesehatan. Hasil ini juga didukung oleh pernyataan dari Dr. Soetarman yang merupakan seorang dokter ahli spesialis makanan. Hasil ini kemudian secara langsung disebarkan melalui media surat kabar dan menghimbau masyarakat untuk menjadikan bekicot sebagai alternatif pengganti protein hewani. Daging bekicot banyak mengandung kadar putih telur yang tinggi sekitar 53% dan kadar lemak sekitar 6,5%, sehingga dengan berbagai kandungan tersebut dapat dikatakan bahwa bekicot termasuk dalam makanan yang berharga (Asia Raya, 24 April 1944).

Menurut tuan Garnadi dari Laboratorium Sekolah Dokter Hewanmenganjurkan bahwasanya: sebelum diolah sebaiknya bekicot tidak diberi makan selama tiga hari agar excrementen (seperti cacing dan lain-lain) dapat keluar semua. Setelah itu bekicot direndam dalam larutan 10% garam (NaCl) untuk menghilangkan lendir. Selanjutnya bekicot dapat direbus dalam larutan tersebut hingga lunak dan daging bekicot dapat dipisahkan dari cangkangnya. Pada bagian ujung dapat dibuang karena terasa pahit. Daging bekicot siap diolah sebagaimana pada pengolahan daging pada umumnya.

Pengelolaan Lahan

Pada masa ini semua aspek khususnya dalam bidang pertanian mendapatkan perhatian lebih. Tidak hanya terfokus pada varietas tanaman baru, namun pada masa ini persoalan mengenai lahan pertanian juga mendapat perhatian. Area tanam harus diperluas. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan anjuran untuk memanfaatkan lahan-lahan yang sekiranya kosong untuk diolah menjadi media tanam. Pemerintah melakukan kampanye yang disebarkan melalui media surat kabar Asia Raya yang terbit pada tanggal 29 April tahun 1944 yang menyatakan bahwa; tiap-tiap rumah tangga, terutama yang memiliki sedikit lahan kosong dalam pekarangan rumah hendaknya mengadakan tanaman sendiri untuk menambah bahan makanan. Tumbuhan-tumbuhan yang sangat mudah untuk ditanam ialah; tjantel, singkong (dapat diambil daunnya untuk sayur), cabai, dan jenis kacang-kacangan (Asia Raya, 29 April 1944).

Selain itu, pembukaan hutan sebagai lahan pertanian juga dilakukan. Kegiatan pembukaan lahan hutan ini dilakukan di Besoeki Sjoe (karesidenan) dibawah pengawasan langsung oleh pemerintah. Adapun wilayah hutan yang akan dibuka berada di lingkup wilayah Jember kenyang terbesar dari wilayah Negosaren seluas 328ha, Paleran 90,90ha, dan Tjoerahgentong seluas 347ha (Djoroe-warta SJ., 15

Januari 1944). Tidak hanya itu, di sepanjang Jalan Idjen Boulevard Malang terdapat sepetak tanah kosong yang terletak di tengah ruas Jalan juga turut dijadikan lahan untuk bercocok tanam. Uniknya, pada masa ini tanaman yang menghiasi sepanjang jalan bukan sejenis ragam tanaman hias melainkan dialihfungsikan untuk penanaman tanaman pangan. Sepanjang seribu meter lahan itu diubah dan ditanami berbagai macam sayuran seperti kacang, kentang dan sayur lainnya (Asia Raya, 22 April 1944). Kegiatan ini dijalankan oleh sekelompok perkumpulan wanita bernama Gadis-Gadis Remadja yang mendapat bimbingan dari PT Tanaka, Malang Shuuchookan (pejabat residen) serta mendapat pengarahan dari Tuan Seucarlo, Malang Shiechoo (residen). Lapangan tersebut telah berubah menjadi lahan perkebunan sayuran yang lebih bermanfaat untuk menambah hasil bumi.

Guna menunjang keberhasilan dalam panen penggunaan pupuk juga perlu diperhatikan. Terhentinya peredaran barang karena blokade ekonomi dan penerapan kebijakan autarki menyulitkan para petani dalam memperoleh pupuk. Pada dasarnya penggunaan pupuk juga menjadi indikator dalam keberhasilan panen (Asia Raya, 24 April 1944).. Oleh sebab itu, masyarakat dan dibantu dengan tenaga ahli mulai mencari bentuk alternatif dengan membuat pupuk organik. Salah satu bentuk hama yang sering menyerang tanaman pertanian adalah bekicot. Namun, hama satu ini juga bisa digunakan sebagai pupuk tanaman. Menurut M. S. Mintardjo (didasarkan pada ilmu tumbuh-tumbuhan) terdapat suatu zat stikstof pada bekicot yang sangat dibutuhkan pada tanaman. Zat ini berfungsi untuk kesuburan tanaman. Oleh sebab itu maka daging bekicot dapat digunakan dan diolah sebagai pupuk tumbuhan.

Adapun cara untuk mengolahnya menjadi pupuk ialah dengan mengumpulkan sejumlah bekicot kemudian direbus. Perebusan ini dilakukan guna untuk memudahkan dalam memisahkan cangkang dan dagingnya. Selain itu, pada tahap ini akan mengurangi kadar racun yang terkandung dalam daging bekicot. Setelah tahap ini, daging bekicot akan dibusukkan atau difermentasi dengan cara menguburnya di dalam tanah atau dapat diletakkan pada tempat dengan suhu ruangan yang dingin (Asia Raya, 24 April 1944). Proses ini dapat berlangsung selama tiga atau empat hari. Daging yang sudah membusuk tersebut kemudian akan dijemur hingga kering. Setelah kering daging akan ditumbuk halus hingga menjadi tepung.

Berdasarkan keterangan dari Tuan S. Ramoewisit, tepung inilah yang mengandung banyak stikstof dan bisa langsung digunakan. Stikstof merupakan bahasa Belanda yang berarti nitrogen. Nitrogen yang dimaksud disini merupakan salah satu zat dalam unsur hara yang dibutuhkan dalam tanaman (Samodra, 2023). Namun, untuk mencapai hasil yang lebih maksimal tepung tersebut dapat dicampur dengan bahan yang banyak mengandung kapur agar tepung tersebut tidak terlalu keras (Asia Raya, 24 April 1944). Pupuk ini bekerja dengan cara menarik zat air agar tersimpan dan terserap dalam tumbuhan. Temuan ini dengan segera disebarluaskan melalui media koran dan dicantumkan mengenai tata cara penggunaannya. Adapun dalam penggunaannya terdapat dua cara yaitu; Pertama, jika pupuk digunakan pada lahan kering dan pada tumbuhan yang sudah bertunas maka sebelum digunakan pupuk

tersebut harus dibasahi lalu dicampur dengan tanah yang sudah basah dan diaduk hingga tercampur rata. Setelah itu, campuran ini dapat disiramkan ke atas tanaman. Adapun untuk cara yang kedua yaitu dengan kondisi tanah yang sudah basah, maka pupuk dapat langsung diaplikasikan dengan cara ditaburkan begitu saja pada sekitar tanaman. Untuk ukuran pemakaian setiap satu hektar dapat digunakan sebanyak tiga kaleng minyak tanah pada masa itu.

Industrialisasi Produksi Sandang di Pulau Jawa

Problematika mengenai ketersediaan pakaian menjadi persoalan yang cukup serius dan mendesak di kalangan masyarakat pribumi di Pulau Jawa. Pakaian merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi, khususnya bagi pasukan militer Jepang. Namun, karena kelangkaan bahan baku menyebabkan kondisi kelangkaan pakaian di pasaran. Kondisi Pulau Jawa yang kaya dengan keragaman hayati tentu menjadi peluang yang cukup bagus guna mencari serat yang dapat digunakan untuk bahan dasar pembuatan pakaian.

Di samping usaha untuk memperbanyak hasil bahan pangan, masyarakat kelas menengah kebawah diharuskan untuk menanam tanaman yang sekiranya mengandung serat yang cukup kuat dipintal menjadi benang untuk kemudian ditenun hingga menjadi sepotong pakaian. Setelah melalui beberapa pengujian, kapuk atau kapas randu Jawa dikenal sangat baik untuk digunakan sebagai serat pakaian. Untuk itu, penanaman kapas mulai diperluas. Hampir seluruh tanah di Jawa terdapat pohon-pohon kapas yang ditanam langsung oleh penduduk setempat. Selain serat kapuk randu dapat juga digunakan serat-serat alami lainnya seperti serat rami, serat nanas, widoeri, kapuk taoen, dan lainnya (Djoroewarta S.S.A., 24 Juni 1944).

Propaganda mengenai kebutuhan sandang juga disuarakan pemerintah melalui media surat kabar. Seperti himbuan Tuan B. Saito dari Himpunan Kebaktian Penduduk Nippon Pereman melalui koran Asia Raya yang terbit pada tanggal 25 Mei 1944, telah memberikan anjuran penting terkait dengan pakaian rakyat di masa perang. Beliau menganjurkan untuk menggunakan serat rosella sebagai bahan dasar dalam pembuatan pakaian. Serat rosella memiliki sifat yang keras dan telah tahan uji, serta harganya terbilang murah (Asia Raya, 25 Mei 1944). Serat rosella dinilai sebagai serat yang sesuai untuk bahan pakaian petani dan buruh dalam masa perang ini. Serat ini dinilai sangat efektif dalam mengurai permasalahan mengenai kelangkaan bahan sandang.

Kebutuhan kapuk dari Pulau Jawa dapat mencapai 16.000 ton setiap tahunnya (Asia Raya, 20 Mei 1944). Untuk itu, melalui kebijakan autarki mengharuskan setiap wilayah di Pulau Jawa mampu memenuhi semua sektor kebutuhan pokok masyarakat. Propaganda juga terus disiarkan oleh pemerintah Jepang. Salah satu bentuk propaganda yang dijalankan yaitu; "Mari kita memintal serta menenun, Sedikitnya guna memenuhi keperluan pakaian sehari-hari"(Asia Raya, 15 April 1944). Melalui propaganda ini diharapkan masyarakat lebih berusaha dan bekerja keras guna mencukupi kebutuhan sandang dalam masyarakat dan menunjang dalam kebutuhan

perang. Untuk itu, penduduk pribumi dilibatkan secara langsung dalam usaha pemenuhan kebutuhan pakaian ini dengan melakukan penanaman kapas di sekitar pekarangan rumah atau pada lahan kosong.

Organisasi Fujinkai juga turut berpartisipasi dengan melakukan pembelajaran cara memintal dan menenun kepada masyarakat setempat. Meskipun kain hasil produksi tidak cukup bagus dan cenderung kasar namun kain ini sangat kuat. Rata-rata penduduk per minggunya dapat menghasilkan kain kurang lebih 1 elo (merupakan satuan panjang lama yang sekarang setara dengan 0.687 meter (ForEach.id, n.d.)) Di wilayah Yogyakarta para anggota Fujinkai juga membuka kursus mengantih (membuat benang lawe) untuk masyarakat setempat. Kursus ini berlangsung selama 15 hari. Selain itu juga terdapat usaha dari S. P. Jogja Koo (pemimpin) yang melakukan penanaman kapas gendjah atau juga dikenal dengan kapas espres. Diperkirakan dari hasil panen kapas tersebut dapat diolah dan menghasilkan pakaian. Rata-rata setiap 5 hari sekali pekerja tenun dapat menghasilkan sepotong baju (Djoroe-warta Dst., 15 April 1944).

Propaganda mengenai menenun dan memintal ini terus diperluas hingga seluruh wilayah di Pulau Jawa. Pada wilayah Prianganshu (karesidenan) telah mampu menghasilkan serat yang mampu mencukupi 33% kebutuhan sandang dari kebutuhan penduduk yang berjumlah kurang lebih 4.500.000 jiwa (Djoroewarta S.S.A., 24 Juni 1944). Sebelumnya daerah ini merupakan daerah industri tenun yang cukup besar. Bedanya, dahulu daerah ini memasok benang dari suplai luar negeri. Sedangkan untuk masa ini kebutuhan bahan mentah seperti benang harus diproduksi sendiri dengan cara memanfaatkan jenis kapas mori yang dipintal untuk dijadikan benang.

Selain itu di daerah Banyuwangi Ken, Hookookai menganjurkan kepada penduduk untuk mengadakan perusahaan-perusahaan tenun di tiap-tiap Ku (desa) di seluruh Ken (kabupaten). Bahkan Banyuwangi Kentelah membentuk lembaga Tebokai yang merupakan sebuah badan pusat pertenunan. Fungsi utama dari badan ini ialah memfasilitasi semua keperluan dan kebutuhan dalam menjalankan industri tenun. Badan ini yang mendatangkan alat-alat tenun dari luar daerah dan bersedia memberikan pengajaran dan kursus kepada penduduk mengenai cara mengantih dan menenun. Lembaga ini dapat memproduksi sebanyak enam lembar potong pakaian jadi dalam kurun waktu 20 hari dengan bahan baku kapas mentah dengan berat kira-kira 10 kg (Domei, 24 Juni 1944).

Kegiatan menenun secara manual ini terus diperluas dan dikembangkan. Selain sebagai daerah pertanian penghasil bahan pangan, daerah Besoekishuu (karesidenan) juga merupakan salah satu wilayah yang banyak terdapat tumbuhan kapas. Oleh sebab itu, industri tenun mulai digalakkan. Sebelumnya, semua bentuk kebutuhan pokok seperti kebutuhan sandang selalu disuplai dari daerah lain. Namun, karena ditetapkan kebijakan autarki mengharuskan daerah Besoekishuu untuk dapat menyuplai kebutuhan sandangnya secara mandiri. Pekerjaan menenun ini juga termasuk pekerjaan yang baru bagi masyarakat setempat. Untuk itu, masyarakat mulai dikenalkan dengan sistem dan tata cara dalam mengelola industri tenun karena

sebelumnya sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani (Djoro-warta S.d, 4 April 1944).

Sebagai penunjang kemajuan industri tenun, dibentuklah badan Tojo Jusankai yang didirikan di Bondowoso. Melalui badan ini industri tenun dimulai dengan pemintalan benang lawe dengan menggunakan alat yang cukup memadai. Produksi pakaian untuk penduduk terutama untuk pasukan militer belum begitu besar. Menurut Haitami dalam koran Sinar Baru menyatakan bahwa sebanyak 90% dari penduduk tanah Jawa yang terdiri dari kaum petani membutuhkan pakaian. Pada umumnya, pakaian yang ditujukan untuk para petani itu tidak sampai ke tangan petani-petani (Domei, 31 Juli 1944). Diperkirakan jika setiap orang membutuhkan sekitar 2 kg pakaian setiap tahunnya, maka seluruh penduduk Jawa dan Madura (termasuk angkatan militer) harus memiliki sekitar $50.000.000 \times 2 \text{ kg} = 10.000.000$ potong pakaian (Asia Raya, 20 Mei 1944). Jika gerakan menenun pakaian ini dapat berjalan dengan baik dan berhasil maka krisis sandang ini dapat teratasi.

Selanjutnya untuk memperdalam dan menambah kemampuan masyarakat dalam memproduksi pakaian, maka pemerintah berusaha untuk menyebarkan kepandaian menenun di kalangan masyarakat. Pemerintah memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan menenun dengan mengadakan pertunjukan mengantih dan memintal kapuk menjadi benang di Djatinegara Kenyakusho pada tanggal 27 Juni tahun 1944. Tjawang Gunchoo (wedana) telah membuka pelatihan bagi kaum wanita, fujinkai, maupun dari rakyat kelas menengah kebawah (Asia Raya, 12 Juli 1944).

Pelatihan ini terfokus pada pelatihan pembuatan bahan-bahan pakaian dari serat alami seperti kapuk randu, nanas pagar dan lainnya. Keseluruhan bahan dasar juga sudah tersedia di wilayah tersebut, sehingga tidak perlu menyuplai dari daerah lain dan dapat memanfaatkan dengan maksimal hasil bumi dari wilayah sendiri sesuai dengan penerapan kebijakan autarki. Pelatihan yang sama juga dibuka di wilayah Garut ken (Djoroe-warta M.A., 1 Juni 1944). Pemerintah mengadakan latihan memintal benang. Setiap Ku(des) mengirimkan seorang wakil untuk belajar langsung. Adapun benang yang akan dipintal ialah berasal dari serat haramaj, rosella, Teureup, kapas dan lainnya.

Selain itu, di wilayah Sidoarjo Son (kecamatan) dan Sragen-Ken (kabupaten) telah ditemukan bahan-bahan untuk membuat cat pakaian yang berasal dari tumbuhan dan daun-daunan. Cara pembuatannya cukup mudah, ialah dengan mencampurkan daun dan tumbuhan tersebut ke dalam larutan air kapur dan jeruk pecel. Cat ini nantinya akan digunakan untuk mewarnai pakaian yang berbahan dasar dari widoeridan kapas, hingga pada saat berita ini diterbitkan telah ditemukan sebanyak 8 macam warna cat pakaian dan telah banyak digunakan di wilayah ini (Domei, 14 Agustus 1944). Selain pakaian, penduduk juga memerlukan alat perlindungan diri karena sewaktu-waktu pasukan sekutu dapat melakukan serangan yang tak terduga. Untuk itu, guna menjaga diri dari bahaya bom atau peluru di waktu terjadinya serangan udara, seorang penduduk Surabaya telah berhasil membuat topi

dengan bahan dasar rotan yang dapat melindungi kepala dari serangan-serangan udara yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Topi ini sudah lulus uji oleh pihak berwajib dan dapat digunakan oleh penduduk dengan harga jual topi senilai f 1.75 (Asia Raya, 23 Juni 1944).

KESIMPULAN

Strategi pengolahan dan sandang yang diterapkan oleh pemerintah Jepang sebagai bentuk implementasi kebijakan autarki guna mendukung dalam perang Asia Pasifik yang sedang berlangsung dikemas secara rapi dan terstruktur. Semua bentuk kebijakan dan strategi yang diterapkan dijalankan secara terselubung dalam skema propaganda melalui media surat kabar koran. Melalui beberapa skema propaganda yang diterapkan, Pemerintah Jepang mampu mengolah dan mengendalikan semua bentuk hasil bumi di Pulau Jawa. Melalui media surat kabar inilah pemerintah Jepang menyebarluaskan semua bentuk kebijakan yang telah ditetapkan dan mengontrol semua bentuk kegiatan dalam masyarakat. Pemerintah Jepang terus mengoptimalkan semua bentuk kekayaan hasil bumi melalui kebijakan autarki dengan strategi melipatgandakan hasil bumi sehingga ditemukannya beberapa alternatif olahan pangan dan sandang yang menjadi kebutuhan pokok selama perang berlangsung. Selain itu, guna memaksimalkan semua potensi yang ada pemerintah Jepang juga memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk dialih fungsikan sebagai area tanam. Pada masa ini industri tenun secara manual juga dilakukan secara besar-besaran. Hal ini dikarenakan untuk menutup kebutuhan sandang yang semakin mendesak. Masyarakat dikerahkan secara masal dan besar-besaran untuk menutup semua kebutuhan logistik dalam perang. Faktanya strategi yang diterapkan pemerintah Jepang dapat mengatasi persoalan krisis, namun hal ini tidak berpihak kepada masyarakat. Semua bentuk strategi pengolahan sandang dan pangan ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang menurun. Semua bentuk kekayaan bumi dan tenaga kerja masyarakat habis terkuras dan dialokasikan dalam memenuhi kebutuhan perang, sedangkan kebutuhan pokok masyarakat pada masa ini terabaikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Aisyah, R. (2016). *Industri Tekstil Pada Masa Pendudukan Jepang Di Surabaya 1942-1945*. Universitas Airlangga.
- Asia Raya*. (1944, May 20). Kapoek Djawa Jang Termasjhoer Sebagai Bahan Itoe, Ialah Kapoek Randoe.
- Asia Raya*. (1944, May 20).Kapoek Djawa Terkenal di Seloeroeh Djawa: Tjoraknja Keboetoehan Kita.
- Asia Raya*.(1944, April 24).Keong (Bekidjot).
- Asia Raya*.(1944, April 15). Mari Memintal dan Menenoen: Di Bogor Shuu Tenoenan Tangan Dihidoepkan Lagi.
- Asia Raya*.(1944, July 12). Menjebarkan Kepandaian Menenoen Dikalangan Rakjat.
- Asia Raya*.(1944, May 25).Serat Rosella Sebagai Bahan Pakaian Rakjat.
- Asia Raya*.(1944, April 22).Tenaga Wanita.

- Asia Raya*. (1944, April 29). Tjatan I: Tjantel (Andropogon Sorghum Brot).
- Asia Raya*. (1944, April 29). Tjatan III: Makanan Sederhana Jang Sehat, Moerah dan Moedah Didapat.
- Asia Raya*. (1944, June 23). Topi Rotan Pengganti Topi Wadja.
- Djoroewarta Dst. (1944, June 14). Memperlipat Hasil Boemi: Andjoeran Menanam Ketela Manis. *Asia Raya*.
- Djoroewarta Dst. (1944, April 15). Memperlueas Pertenoenan Bahan Pakaian. *Asia Raya*.
- Djoroewarta S.S.A. (1944, September 2). Menghidupkan Kembali Pertenoenan Desa. *Asia Raya*.
- Djoroewarta S.S.A. (1944, February 23). Penanaman Soba. *Asia Raya*.
- Djoroewarta SJ. (1944, January 15). Pemboekaan Hoetan. *Asia Raya*.
- Djoroewarta M.A. (1944, June 1). Latihan Memintal Benang Di Garoet-Ken. *Asia Raya*.
- Djoroewarta S.d. (1944, April 4). Kemadjoan Peroesahaan Tenoen: Keboen-Keboen Kapas Diperloeas. *Asia Raya*.
- Djoroewarta S.S.A. (1944, June 24). Oesaha Memperbanjak Bahan Pakaian. *Asia Raya*.
- Domei. (1944, August 14). Bahan-Bahan Tjat Pakaian Dari Daoen-Daoenan Dan Toemboeh-Toembohan. *Asia Raya*.
- Domei. (1944, February 26). Katoel Dapat Dijadikan Tempe. *Asia Raya*.
- Domei. (1944, June 24). Menenoen Pakaian Sendiri: Dari Kapas Mendjadi Badjoe Dalam Tempo 23 Hari. *Asia Raya*.
- Domei. (1944, July 31). Pertemoean "Tanja-Djawab" Antara Hoodoohan Dengan Wartawan Jang Telah Mengoendjoengi Paberik-Paberik di Tanah Jawa. *Asia Raya*.
- Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang. *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 13(2), 189.
<https://doi.org/10.17977/um020v13i22019p189-205>
- Julianto, I. (2004). EKSPLOITASI EKONOMI PENDUDUKAN JEPANG DI SURAKARTA (1942-1945). *Humaniora*, Volume 16(1), 35-49.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Tiara Wacana Yogya.
- Kurasawa, A. (2015). *Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945*. Komunitas Bambu.
- Oktorino, N. (2016). *Di Bawah Matahari Terbit: Sejarah Pendudukan di Indonesia 1941-1945*. Elex Media Komputindo.
- Pratama, A. (2018). *Masa Pendudukan Jepang*. Derwati Press.
- Putri, D. L. (2014). *Kebijakan Penyerahan Wajib Padi di Temanggung Ken Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)* [Universitas Sebelas Maret].
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/43004/Kebijakan-penyserahan-wajib-padi-di-Temanggung-Ken-Masa-Pendudukan-Jepang-1942-1945>
- SARI, D. K. (2012). Kebijakan Ekonomi Jepang Di Blitar Tahun 1942-1945. *Repository.Unej.Ac.Id*. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/76489>
- Samodra, P. F. (2023). *9 Manfaat Bekicot bagi Manusia dan Lingkungan yang Jarang Diketahui*. Liputan6.Com.
<https://www.liputan6.com/hot/read/5196664/9-manfaat-bekicot-bagi-manusia-dan-lingkungan-yang-jarang-diketahui>

- Sinar Baroe*.(1944, February 5).Nasehat Penting: Tjara Memasak Gaplek.
Sinar Baroe.(1944, May 9).Tjantel Sebagai Pengganti Padi.
Sofianto, K. (2014). Garut Pada Masa Pemerintahan Pendudukan Jepang (1942-1945). *Sosiohumaniora*, 16(1), 70.
<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v16i1.5684>
van der Eng, P. (2008). Food Supply in Java during War and Decolonisation, 1940-1950. In *MPRA* (Issue May). <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/8852/>